

Desain Pemilu Ideal: Kedekatan Optimal dengan Implikasi *Coattail effect*

Fyna Rahmatika Elba¹, Enika Maya Oktavia²,
Dimas Nur Akbar Palatal³, Pinto Kaganti Afwan Halim⁴

Abstract

General elections are pivotal moments in the dynamics of a country's democracy, including in Indonesia. Elections involve various political parties coalitioning to nominate their leaders. This study compares the coattail effect's impact on the 2019 and 2024 elections. The research method employs a normative approach with comparative, conceptual, and historical analyses. Secondary data were collected from various sources. The results indicate differences in the coattail effect's impact between the two elections. Although the popularity of presidential candidates can influence the vote share of their supporting political parties, the effects are not always consistent. In the 2024 election, Prabowo-Gibran won the majority vote, but the coattail effect only occurred for their main supporting party. Conversely, in the 2019 election, PDIP and PKB experienced a more significant coattail effect. The analysis also suggests that the ideal electoral design with a coattail effect involves changing the electoral system to a closed proportional system and removing the Presidential threshold. This study is crucial for understanding the political dynamics within Indonesia's democratic system.

Keywords: *Coattail effect, General Elections, Political Parties.*

Abstrak

Pemilihan umum adalah momen penting dalam dinamika demokrasi suatu negara, termasuk di Indonesia. Pemilu melibatkan berbagai partai politik yang berkoalisi untuk mencalonkan pemimpinnya. Studi ini membandingkan dampak coattail effect pada pemilu 2019 dan 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis komparatif, konseptual, dan historis. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasilnya menunjukkan perbedaan dampak coattail effect antara kedua pemilu tersebut. Meskipun popularitas capres dapat memengaruhi perolehan suara partai politik pengusung, efeknya tidak selalu konsisten. Pada pemilu 2024, Prabowo-Gibran memenangkan suara mayoritas, tetapi coattail effect hanya terjadi pada partai pengusung utama mereka. Sebaliknya, pada pemilu 2019, PDIP dan PKB mendapatkan dampak coattail effect yang lebih signifikan. Analisis juga menunjukkan bahwa desain ideal pemilu dengan coattail effect adalah dengan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dan menghapus ambang batas presiden. Studi ini penting untuk memahami dinamika politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Efek Ekor Jas, Partai Politik, Pemilu Serentak, Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu merupakan ajang pesta demokrasi yang dilaksanakan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemilu adalah kontestasi politik guna melahirkan dan menentukan pemimpin yang akan memegang dan membentuk kekuasaan dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif.⁵ Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia saat ini sendiri adalah sistem pemilu serentak, di mana pemimpin yang dipilih di dalamnya termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mana pada tahun 2019 menjadi bentuk Pemilu Serentak pertama di Indonesia yang

¹ Fyna Rahmatika Elba, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

² Enika Maya Oktavia, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ Dimas Nur Akbar Palatal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: dimssnap9@gmail.com.

⁴ Pinto Kaganti Afwan Halim, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁵ Surya Ningsih, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, vol. 1, 2023, 57–66.

menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara bersamaan dan selanjutnya pada tahun 2024 ini Indonesia kembali menggelar ajang pemilu serentak.⁶

Pada setiap pelaksanaan pemilu, terdapat partai-partai politik yang akan berkoalisi untuk mencalonkan kandidatnya masing-masing sebagai calon pemimpin yang akan dipilih nantinya. Presensi dari partai politik ini menjadi salah satu bentuk penting dalam proses berjalannya demokrasi. Dalam mendukung dan membentuk semangat pemilu 2024 guna meningkatkan citra partai agar menjadi lebih baik dan menciptakan calon yang berkualitas serta, para partai politik berlomba untuk menciptakan sistematisa keberlangsungan pencalonan yang efektif. Jumlah partai politik yang berkoalisi pada pemilu presiden tahun 2024 serta calon kandidat pengusungnya, diantaranya yaitu: pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar yang diusung oleh partai(Nasdem, PKS, dan PKB), pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang di usung oleh (Gerindra, Golkar, PAN, Garuda dan Gelora), pasangan Ganjar Pranowo yang di usung oleh (PDIP, PPP, Perindo dan Hanura) yang dimenangkan oleh pasangan calon Prabowo-Gibran yang diusung oleh partai (Gerindra, Golkar, PAN, Garuda, Gelora) dengan perolehan suara sebanyak 58%. Dari hal ini, diduga akan adanya bentuk *coattail effect* (efek ekor jas) yang berdampak pada partai pendukung presiden di parlemen yang kuat. Di mana, menurut Matthew Soberg Shugart dan Scott Mainwaring berpendapat bahwa dalam pemilu serentak terdapat efek yang disebut dengan *coattail effect*, yang artinya terpilihnya capres dan cawapres akan mempengaruhi keterpilihan calon legislative.⁷

Coattail effect (efek ekor jas) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku yang menyebabkan kemunculan pengaruh pada tindakan dan perilaku lain atau adanya pengaruh ikutan.⁸ Dugaan adanya *coattail effect* pada pemilu serentak dinilai terjadi pada pemilu tahun 2019, dimana terdapat kenaikan perolehan suara dari partai pengusung pasangan capres dan cawapres. Elektabilitas suara pada partai pengusung nantinya akan dimiliki calon pemimpin yang diusung. suara partai pengusungnya, karena pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Dapat dikatakan juga partai memperoleh *benefit electoral* dari capres yang diusungnya karena adanya *coattail effect*⁹.

Oleh karena itu, pasangan presiden dan wapres yang menang dalam perolehan suara pemilu, seharusnya memberikan dampak kuat bagi partai pengusungnya di parlemen. Namun, pasangan Prabowo-Gibran tidak membuktikan adanya *coattail effect* yang dinilai demikian, disebabkan partai pengusungnya yaitu Gerindra hanya memenangkan (13,22%) dalam kedudukan pemerintahan di parlemen. Selanjutnya, partai pengusung capres dan

⁶ Ganis Wisnujati dan Yuwanto Fitriyah, "Marketing Politik Partai Gerindra Untuk Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Kebumen Tahun 2019," PAN 2, no. 4 (t.t.): 4.

⁷ Heri Wahyudi dan Meita Istianda, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden Dan Anggota Legislatif)," Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS) 1, no. 1 (2023): 229–46.

⁸ Sahran Raden, "Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial," Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 1 (2021): 22–45.

⁹ Efek ini terjadi ketika popularitas atau keberhasilan seorang kandidat di satu tingkat pemilihan memengaruhi hasil pemilihan di tingkat lainnya. Dalam konteks ini, efek "coattail" dapat berdampak pada dukungan bagi partai-partai politik yang terlibat dalam pemilu, baik dengan meningkatkan atau menurunkan suara mereka

wapres lain lah yang memenangkan suara terbanyak dalam kedudukan di parlemen, yaitu partai PDIP (16,27%).

Studi komparatif menunjukkan bahwa sistem pemilu yang mengakomodasi *coattail effect* cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pemilu serentak seringkali menghasilkan keselarasan antara presiden terpilih dan mayoritas di Kongres, seperti yang terjadi pada pemilu 2008 ketika kemenangan Barack Obama juga membawa Partai Demokrat meraih mayoritas. Hal ini memfasilitasi proses legislasi dan implementasi kebijakan yang lebih lancar. Di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya terbukti, potensi *coattail effect* dalam pemilu serentak 2019 dan 2024 dapat menjadi faktor penting dalam membentuk dinamika politik yang lebih produktif.

Desain pemilu yang mempertimbangkan *coattail effect* dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi politik yang sering terjadi di negara-negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia. Dengan mendorong konsolidasi dukungan terhadap pasangan capres-cawapres, *coattail effect* berpotensi mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama desain pemilu untuk menciptakan sistem yang tidak hanya representatif, tetapi juga efektif dalam menghasilkan pemerintahan yang stabil dan responsif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa *coattail effect* merupakan elemen penting dalam desain ideal pemilu, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menganalisis data pemilu 2019 dan 2024, studi ini berupaya menunjukkan bagaimana *coattail effect* dapat berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang lebih efektif dan kohesif. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika *coattail effect* diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem pemilu yang tidak hanya menjamin representasi yang adil, tetapi juga mendorong stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan governance yang dihadapi Indonesia sebagai negara demokrasi multipartai dengan keragaman sosial-politik yang tinggi.

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian-penelitian yang mengangkat topik *coattail effect* pada gelaran pemilu serentak di Indonesia membahas pada periode 2019 yang dimana pemilu tahun tersebut hanya memunculkan dua kompetitor seperti pasangan 01, Joko Widodo-Ma'aruf Amin yang di mana Joko Widodo adalah kader dari PDIP dan Ma'aruf Amin yang membawa semangat organisasi Naudhlatul Ulama yang terkenal dengan ciri khas PKB juga diusung oleh PKB. Kemudian untuk pasangan 02 yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang juga mendapatkan bagian *coattail effect* yang dimana Prabowo adalah ketua umum Gerindra dan sandiaga adalah usungan dari koalisi gabungan. Berbeda dengan penelitian ini yang terjadi pada tahun 2024 yang memunculkan tiga pasangan capres dan cawapres yang menyebabkan terpecahnya gerbong lama PDIP karena salah satu kadernya maju berkompetisi mengikuti koalisi yang menjadi lawan pada periode pemilu sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Pertama, bagaimana komparasi dampak *coattail effect* pada periode pemilu 2019 dan pemilu 2024? Kedua, bagaimana desain pemilu yang memungkinkan terjadinya *coattail effect* secara berimbang?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menganalisis berbagai peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan terutama adalah data sekunder, yang meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan publik. Selanjutnya, teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan identifikasi pola, temuan utama, dan interpretasi mendalam dari data yang ditemukan dalam literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan.

Pembahasan

Sebelum membahas substansi penelitian terkait *coattail effect* dalam Pemilu Serentak tahun 2019 dan 2024 serta rekomendasi ideal; perlu diantarkan terlebih dahulu terkait praktik umum *coattail effect*¹⁰. Selain Indonesia, konsep ini juga ditemukan di Negara Brazil yang sama-sama menerapkan pemilu secara serentak.¹¹

Dalam pemilu yang dilaksanakan di Brazil yang pemilunya terdesentralisasi,¹² dapat dilihat pola *coattail effect* yang mana terdapat keterkaitan yang signifikan antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.¹³ Dibandingkan Indonesia, efek "*coattail*" yang terjadi berbeda (di Indonesia berada pada sesama pemerintahan nasional). Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah perbedaan dalam sistem politik, Brazil memiliki partai-partai yang terorganisir dengan baik dan memiliki cengkeraman yang kuat dalam sistem politik. Sementara Indonesia memiliki struktur partai politik yang lebih beragam dan seringkali lebih fragmentaris¹⁴ yang dapat

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2022, "Pemilu Secara Serentak Bertujuan Memperkuat Sistem Presidensial" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772>

¹¹ Pemilu serentak di mana berbagai tingkat pemilihan umum diadakan secara bersamaan, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses demokratisasi dan memperkuat keterkaitan antara berbagai tingkat pemerintahan. Lihat:

¹² Cesar Zucco dan Timothy J Power, "Fragmentation without cleavages? Endogenous fractionalization in the Brazilian party system," *Comparative Politics* 53, no. 3 (2021): 477–500.

¹³ Tiago Ventura, "Do mayors matter? Reverse coattail on congressional elections in Brazil," *Electoral Studies* 69 (2021): 102242.

¹⁴ Noory Okthariza, "Explaining party fragmentation at district-level Indonesia," *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 4 (2022): 1008–24.

menghambat efektivitas¹⁵ dari efek “*coattail*” karena adanya perbedaan preferensi dan strategi politik antara berbagai partai politik.¹⁶

Model ideal dari *coattail effect* terjadi ketika popularitas atau kesuksesan kandidat secara langsung memengaruhi hasil pemilihan di tingkat lainnya maupun dukungan bagi partai politik yang terlibat.¹⁷ Namun dalam praktiknya variatif; terdapat pola paralel dimana suara untuk pasangan capres sejalan dengan dukungan dari partai-partai politik yang mendukungnya.¹⁸ Terdapat juga pola dimana suara pasangan calon terkadang melebihi total dukungan dari partai politik pengusungnya.¹⁹ Terdapat juga pola yang menunjukkan bahwa suara untuk pasangan calon lebih rendah daripada total dukungan dari partai politik pengusungnya.²⁰ “Bagaimana Praktik yang terjadi di Indonesia” akan dianalisis melalui jawaban dari rumusan masalah penelitian berikut:

***Coattail effect* dalam Pemilu Serentak 2019 dan 2024**

Dalam sistem pemerintahan presidensial, *deadlock* menjadi salah satu hambatan terbesar karena presiden tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen.²¹ Di Amerika Latin, pemilihan presiden dan legislatif dilakukan serentak dengan harapan pemilih akan memilih partai politik pengusung presiden.²² Dipercaya bahwa popularitas seorang capres dapat meningkatkan jumlah suara yang diterima oleh partai politik yang mendukungnya, sehingga memungkinkan presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen.

Namun, kenyataannya, pada pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 tidak berjalan signifikan. Terdapat kebingungan pemilih dan tingginya jumlah suara tidak sah, menyebabkan kompleksitas penyelenggaraan. Persyaratan 20% kursi DPR RI dan 25% perolehan suara nasional tidak terpenuhi oleh partai politik manapun, memaksa terbentuknya koalisi. Seharusnya, persyaratan tersebut tidak dibutuhkan dalam pemilihan serentak.²³

Dalam konteks partai politik yang berkoalisi, hanya partai yang mengusulkan kadernya sebagai capres yang diuntungkan. Partai koalisi yang tidak mengusulkan

¹⁵ Faktor-faktor seperti sistem politik yang berbeda, struktur partai politik yang fragmentaris, dan tingkat institusionalisasi yang terpusat dapat menghambat efektivitas dari efek “*coattail*” dalam menciptakan kesesuaian suara antara berbagai tingkat pemilihan. Lihat: Tonny Dian Effendi, “Estimating the multilevel coattail effect during the 2019 Indonesian election,” *Asian Affairs: An American Review* 49, no. 3 (2022): 140–65.

¹⁶ Djayadi Hanan dan Deni Irvani, “The Coattail effect in multiparty Presidential elections: evidence from Indonesia,” *Asian Survey* 62, no. 2 (2022): 240–68.

¹⁷ Patrick Cunha Silva dan Brian F Crisp, “Unintended Institutional Interactions: Presidential Coattail and Gender Parity Quotas,” *Political Research Quarterly* 75, no. 3 (2022): 620–31.

¹⁸ Davit Romansa, “COATTAIL EFFECT STRATEGY OF GERINDRA PARTY IN 2019 CONCURRENT ELECTION,” *Revista UNISCI*, no. 53 (2020).

¹⁹ Mykola Morhun, “Model of redistribution of political parties supporters,” dalam *Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International scientific and practical conference*, 2020, 117–19.

²⁰ Hilde Coffé dan Åsa von Schoultz, “How candidate characteristics matter: Candidate profiles, political sophistication, and vote choice,” *Politics* 41, no. 2 (2021): 137–55.

²¹ Indah Aulia Putri, “Presidential threshold dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” 2019.

²² Ridho Imawan Hanafi, *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

²³ Lembaga Penelitian Politik Indonesia, *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*, 2021.

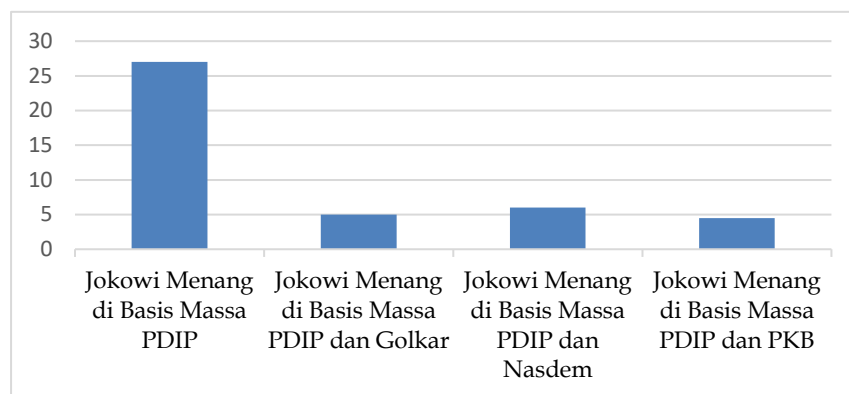
kader tidak terdampak oleh *coattail effect*.²⁴ Hal ini karena *coattail effect* hanya terjadi ketika capres berasal dari internal partai politik. Partai yang capresnya bukan berasal dari internal partai tidak akan mendapatkan keuntungan dari *coattail effect*, kecuali mereka dapat membangun asosiasi dengan presiden terpilih.

Eksistensi *Coattail effect* Pada Pemilu 2019

Dalam Pemilu Serentak 2019, diharapkan akan tercipta korelasi antara suara yang diterima oleh pasangan capres-cawapres dan total suara yang diperoleh partai politik pengusung. Sayangnya, partai politik yang tidak mengusung kadernya sendiri tidak begitu terdampak *coattail effect*, sepenuhnya berbanding terbalik dengan partai yang mengusung kader partainya sebagai capres, seperti PDIP dan Gerindra.

Grafik 1

Dapil Basis Partai Pengusung yang Memenangkan
Joko Widodo dan Ma'aruf Amin

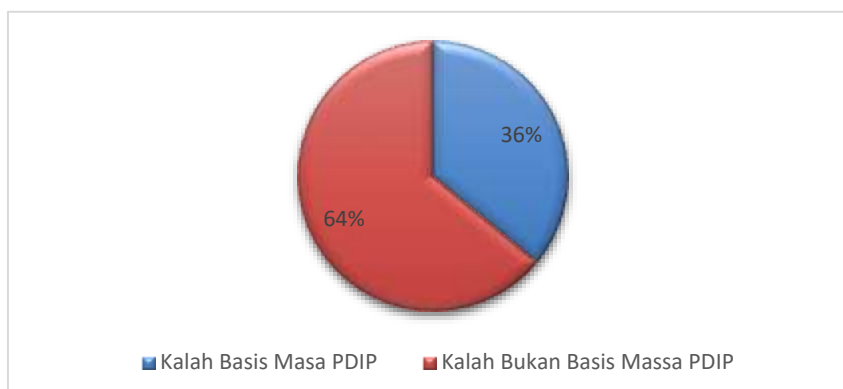


Sumber : Rumah Pemilu 2019

Jokowi-Ma'ruf memenangkan 44 dari 80 Dapil DPR RI, dengan 61,36% kemenangan terjadi di daerah yang merupakan basis PDIP. Elektabilitas pasangan tersebut menjadi pendorong utama bagi kesuksesan PDIP dalam pemilu legislatif. Secara total, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf memberikan keuntungan bagi PDIP di 42 Dapil, sementara hanya di 4 Dapil pasangan tersebut memenangkan partai koalisinya seperti PKB, NasDem, dan Golkar.

²⁴ *Ibid*

Diagram 1
Dapil Joko Widodo dan Ma'aruf Amin Kalah



Sumber : Rumah Pemilu 2019

Meskipun demikian, terdapat Dapil di mana PDIP memperoleh suara cukup besar, namun pasangan Prabowo-Sandi yang keluar sebagai pemenangnya. Contohnya, di Dapil Sumut I, Riau I, Bengkulu, DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, Jabar I, Jabar VI, Jabar IX, Jabar X, Banten III, Kalsel II, Sultra, dan Malut. Namun, ada juga 23 Dapil di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf kalah dan suara PDIP juga kecil, menunjukkan adanya *coattail effect* antara pasangan tersebut dan PDIP.

Di beberapa daerah, PDIP memenangkan pemilihan, tetapi pasangan Jokowi-Ma'ruf mengalami kekalahan. Contohnya, di Dapil Sumut I di mana PDIP memperoleh 20,89% suara, namun total suara partai koalisi Jokowi-Ma'ruf lebih besar 6% dari perolehan suara partai pengusung Prabowo-Sandi namun pemilih lebih banyak memilih pasangan capres Prabowo-Sandi. Hal ini menunjukkan adanya *split ticket voting*,²⁵ yang merupakan efek samping dari pemilihan yang dilakukan di berbagai tingkatan pemerintahan secara bersamaan.

Selain PDIP, terdapat satu partai lain yang mengalami *coattail effect*, yaitu PKB. Cawapres Jokowi, Ma'ruf Amin, adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan basis massa PKB, terutama di Jawa Timur. Oleh karena itu, dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf juga memberikan dampak positif bagi perolehan suara PKB, terutama di wilayah-wilayah dengan basis massa NU yang kuat, seperti Jawa Timur.

Dari analisis tersebut, terlihat bahwa jumlah partai politik yang mendukung Jokowi-Ma'ruf lebih banyak, tetapi hal ini tidak secara langsung memengaruhi perolehan suara mereka, yang cenderung lebih kecil daripada total suara partai-partai yang mendukungnya. Sebaliknya, Prabowo-Sandi hanya mengalami hal ini dalam enam dapil, meskipun didukung oleh jumlah partai politik yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan suara partai-partai yang mendukungnya. Efek "*coattail*" hanya terlihat pada partai politik utama yang mendukung pasangan tersebut, seperti PDIP dan PKB. Namun, suara partai politik pendukung lainnya lebih

²⁵ Barry C Burden dan Gretchen Helmke, "The comparative study of split-ticket voting," *Electoral Studies* 28, no. 1 (2009): 1–7.

dipengaruhi oleh basis massa partai di daerah pemilihan daripada popularitas pasangan calon. Meskipun Jokowi-Ma'ruf mungkin kalah di beberapa daerah pemilihan, partai-partai yang mendukungnya masih mendapatkan suara yang signifikan karena dukungan yang kuat dari basis partai di wilayah tersebut.

Eksistensi *Coattail effect* Pada Pemilu 2024

Dalam pemilu 2024, pasangan pemenang adalah Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 96.214.691, namun partai pengusung utamanya hanya memperoleh 20.071.708 suara, berbanding terbalik dengan PDIP yang memenangkan pileg dengan perolehan suara 25.387.279. Perolehan suara PDIP hampir seimbang dengan jumlah suara pasangan calon yang diusungnya, yaitu Ganjar-Mahfud sejumlah 27.040.878. Dari data ini, terlihat bahwa *coattail effect* hanya terjadi dari Ganjar-Mahfud kepada partai pengusung utama, bukan pada partai koalisinya. Ini disebut sebagai *conventional coattail effect*,²⁶ di mana partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud tidak mampu melakukan asosiasi untuk menciptakan *diffused coattail effect*.

Coattail effect hanya terjadi pada pasangan calon nomor 1, yaitu Anies-Muhaimin, di mana perolehan suaranya berbanding lurus dengan perolehan suara dari partai koalisinya. Dimana hasil rekapitulasi jumlah suara Pasangan Anis Muhaimin adalah 42 juta sedangkan total suara partai koalisinya mencapai 40 juta. Melihat hal tersebut partai koalisi Anies-Muhaimin dapat melakukan asosiasi dengan baik sehingga terjadi efek ekor jas menyebar.

Sedangkan pasangan calon nomor 2, Prabowo-Gibran, hanya memberikan efek konvensional pada partai pengusung utamanya, yakni Gerindra dan Golkar, sementara partai-partai lain seperti PSI, Gelora, dan Garuda tidak begitu terdampak *coattail effect*. Bahkan partai pendukung utama, Gerindra, tidak mampu menjadi partai pemenang, dengan jumlah suara partai koalisinya hanya mencapai 2/3 dari total suara yang diperoleh Prabowo-Gibran. Dari total delapan partai koalisi Prabowo-Gibran, hanya empat partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Suara yang diperoleh koalisi Prabowo-Gibran mencapai 65.547.525 atau sekitar 43,18% dari total pemilih di Indonesia. Di sisi lain, terdapat empat partai lain yang tidak berhasil melewati ambang batas parlemen. Partai-partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia, dan PBB (Partai Bulan Bintang).

Meskipun hanya empat partai dari koalisi yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen, pasangan Prabowo-Gibran mampu meraih suara yang cukup signifikan. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil

²⁶ Dalam konteks koalisi yang mendukung pasangan capres dan wapres, efek ekor merupakan fenomena di mana partai-partai yang tergabung dalam koalisi tersebut mendapatkan manfaat dari kemenangan pasangan tersebut. Manfaat ini terutama dirasakan oleh partai-partai yang berasal dari latar belakang politik yang sama dengan capres dan wapres, karena adanya kerja sama yang efektif antara mereka. Fenomena ini sering disebut sebagai "efek kerja konvensional". Namun, bagi partai politik lain yang juga menjadi anggota koalisi, tetapi tidak berasal dari latar belakang politik yang sama dengan pasangan calon, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama. Lihat dalam David Samuels, "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brasil." *Comparative Politics* (October 2000). 1-20

penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden 2024, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh total 96.214.691 suara. Perbandingan antara jumlah suara yang diperoleh oleh koalisi Prabowo-Gibran dan jumlah suara dari partai-partai yang mendukung mereka yang berhasil masuk parlemen menunjukkan adanya pola yang menarik. Meskipun hanya empat partai yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen, suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran jauh lebih besar dari jumlah suara yang diperoleh oleh partai koalisi tersebut secara individu. Hal ini mengindikasikan bahwa suara yang diberikan oleh pemilih tidak selalu terkait secara linear dengan jumlah partai dalam koalisi yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Pasangan Prabowo-Gibran mampu memobilisasi dukungan lintas partai yang signifikan, yang menyebabkan mereka meraih suara mayoritas meskipun tidak semua partai koalisinya berhasil masuk parlemen.

Jika dilihat secara linear maka peta hasil pilpres pasangan Ganjar-Mahfud dan partai-partai pengusungnya dapil tempat partai pengusung mereka menang tidak selalu memenangkan Ganjar-Mahfud, misalnya dalam persebaran kekuatan 5 parpol penguasa, partai PDIP sebagai partai pemenang di Sumut, Sumsel, Lampung, Kalteng, Kalbar, Kalut, Banten, Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Sulbar, Sulteng, Maluku, dan Maluku Utara meski partai pengusung utama menang di sebagian provinsi tetapi Ganjar-Mahfud tidak menang di satu provinsi pun di Indonesia.

Daerah basis kemenangan PDIP banyak dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dalam demokrasi pengkultusan, tokoh yang dianggap besar dapat memengaruhi pilihan.²⁷ Dalam hal ini Presiden Jokowi yang berasal dari partai PDIP dan Gibran yang pernah menjadi anggota partai PDIP memecah suara yang mengakibatkan *split ticket voting* vertical dikarenakan kebingungan yang dialami pemilih.

Dari analisis *coattail effect* pada partai-partai pendukung masing-masing pasangan calon, dapat dilihat bagaimana popularitas atau elektabilitas pasangan calon mempengaruhi perolehan suara partai-partai pengusungnya. Selisih hasil pemilu 2019 dan 2024 tergambar sebagai berikut:

Tabel 1.
Pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar

Partai Politik	Pemilu 2019	Pemilu 2024	Selisih
Nasdem	12.661.792	14.660.516	1,99%
PKS	11.493.663	12.781.353	1,29%
PKB	13.570.970	16.115.655	2,43%

Sumber : Katadata Peta Suara Partai Pemilu 2024 vs 2019

²⁷ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengkultusan, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1670-pemilu-2024-waktunya-demokrasi-gagasan-bukan-demokrasi-pengkultusan>

Tabel 2.
Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka

Partai Politik	Pemilu 2019	Pemilu 2024	Selisih
GERINDRA	17.596.839	20.071.708	2,48%
GOLKAR	11.493.663	12.781.353	1,29%
PAN	9.752.623	4.260.169	1,04%
GARUDA	703.536	406.883	-0,23%
GELORA	Tidak Mengikuti	-	-

Sumber : Katadata Peta Suara Partai Pemilu 2024 vs 2019

Tabel 3.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Partai Politik	Pemilu 2019	Pemilu 2024	Selisih
PDIP	27.503.961	25.387.279	-3,61%
PPP	6.323.147	5.878.777	-0,65%
PERINDO	3.738.320	1.955.154	-0,78%
HANURA	Tidak Mengikuti	-	-

Sumber : Katadata Peta Suara Partai Pemilu 2024 vs 2019

Terdapat partai-partai yang mengalami peningkatan suara sebagai hasil dari *coattail effect*, sementara ada pula yang mengalami penurunan suara atau tetap stabil. Hal ini menunjukkan sejauh mana popularitas atau elektabilitas pasangan calon dapat memengaruhi dukungan bagi partai-partai politik yang mendukungnya.

Dalam Pemilu Serentak 2019 dan 2024, ada tiga pola yang bisa dilihat, Pertama, ada pola yang bersifat sejajar di mana persentase suara yang diperoleh oleh pasangan capres beriringan dengan persentase suara yang diperoleh oleh partai-partai politik pengusung. Kedua, terdapat pola di mana persentase suara pasangan calon lebih besar daripada total persentase suara partai-partai pengusungnya. Ketiga, persentase suara pasangan calon lebih kecil daripada total persentase suara partai-partai pengusungnya.

Rekomendasi Desain Pemilu Untuk Menciptakan *Coattail effect* yang Berimbang

Urgensi *coattail effect* dalam desain pemilu menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks sistem multipartai seperti di Indonesia. Fenomena fragmentasi politik yang sering terjadi di negara-negara dengan sistem serupa menunjukkan pentingnya mekanisme yang dapat memperkuat koherensi antara eksekutif dan legislatif. Data dari Pemilu 2014 di Indonesia menunjukkan tingkat fragmentasi yang tinggi, dengan Indeks Fragmentasi Rae mencapai 0,8, yang mengindikasikan sulitnya mencapai konsensus di parlemen.

Mengatasi *Split ticket voting* dalam *Coattail effect* Melalui Perubahan Sistem Proporsional Terbuka Menjadi Proporsional Tertutup

Pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 yang diadakan serentak, terjadi fenomena yang tidak lazim bagi Partai Gerindra. Meskipun pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, berhasil memenangkan Pilpres 2024 dengan suara lebih dari 50%, namun hal tersebut tidak berdampak positif pada perolehan suara Partai Gerindra secara nasional, terutama di Kota Medan. Pada Pemilu 2019, Partai Gerindra berhasil meraih 10 kursi di DPRD Medan, meningkat 4 kursi dari Pemilu 2024 yang hanya mendapatkan 6 kursi.²⁸ Saat itu, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno mengalami kekalahan dalam Pilpres oleh Jokowi. Namun, pada Pemilu 2024 yang diadakan secara bersamaan dengan Pilpres, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dengan suara di atas 50% justru tidak membawa dampak positif bagi suara Partai Gerindra di Kota Medan. Hal terjadi karena *split ticket voting*.

Split ticket voting merupakan fenomena di mana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk jabatan yang berbeda dalam pemilihan yang sama. Dalam konteks Pemilu 2024, terdapat kemungkinan bahwa pemilih melakukan *split ticket voting* antara Pilpres dan Pemilu Legislatif. Dalam konteks *coattail effect*, meskipun pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pilpres, namun keberhasilan mereka tidak secara otomatis membawa dampak positif pada partai pendukungnya, yakni Partai Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa *coattail effect* tidak selalu terjadi secara linear, dan faktor-faktor lain seperti citra partai, kinerja, dan isu-isu spesifik daerah juga memainkan peran penting dalam menentukan dukungan pemilih.

Sinyal akan meningkatnya *split ticket voting* mulai terasa pada pemilu 2009 setelah perubahan sistem proposional tertutup menjadi terbuka. Fenomena ini menuai respons yang beragam dari para pengamat politik pemilu. *Split ticket voting* dianggap sebagai cara untuk mengguncang dominasi partai-partai besar yang selama ini merasakan manfaat dari sistem pemilu *straight ticket voting* yang cenderung menciptakan politisi dengan fokus nasional namun kurang memahami isu-isu lokal.²⁹ Ada pandangan positif terhadap *split ticket voting* karena memungkinkan warga untuk memilih calon legislatif dan partai politik di semua tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Namun, *split ticket voting* juga dianggap membawa risiko karena memungkinkan pemilih untuk memilih presiden dari partai yang berbeda dengan caleg yang mereka pilih.³⁰ Ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan antara presiden dan anggota parlemen, karena afiliasi partai yang berbeda. Menurut Muhammad Qadari, Direktur Lembaga Survei Indo Barometer pada tahun 2007, hasil survei Evaluasi Kinerja SBY-JK dan *Split ticket voting* 2009 menunjukkan bahwa fenomena *split ticket voting* semakin

²⁸ Berita Satu, "Prabowo Menang Pilpres, Kursi DPRD Malah Nyungsep: Mantan Ketua DPC Gerindra Medan Bobby Octavianus Sedih dan Kecewa." <https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/134909/prabowo-menang-pilpres-kursi-dprd-malah-nyungsep-mantan-ketua-dpc-gerindra-medan-bobby-octavianus-sedih-dan-kecewa>

²⁹ Ratri Istania, "Split Ticket Voting: Menumbuhkan Kegairahan Politik Lokal?," Jurnal Borneo Administrator 5, no. 1 (2009).

³⁰ *Ibid*

meningkat pada Pemilu 2009, yang dapat membagi pemerintahan negara dan menghambat kemajuan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru.

Konsekuensi dari penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak adalah munculnya *split ticket voting* di berbagai daerah pemilihan. Pemilih secara alami akan mengelompokkan diri berdasarkan preferensi mereka terhadap caleg dari partai tertentu, yang pada akhirnya akan memperkuat basis partai tersebut di daerah masing-masing. Perubahan pola pemilihan, yang dipicu oleh suara terbanyak dan *split ticket voting*, juga akan berdampak pada perubahan batas-batas elektoral atau distrik pemilihan.

Di Indonesia, ada tren reformasi dalam desain sistem pemilihan umum dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang disoroti oleh Benjamin Reilly. Hal ini karena sistem pemilu menentukan bagaimana suara yang dipilih dalam pemilu diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan di parlemen, yang menjadi aturan utama dalam menentukan siapa yang berkuasa. Salah satu elemen kunci dari sistem pemilihan umum adalah penentuan batas-batas elektoral.³¹

Namun, Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menerapkan sistem representatif proporsional daftar terbuka di Indonesia. Sistem ini menetapkan daerah pemilihan berdasarkan tingkatan wilayah, seperti kabupaten/kota dan provinsi, dengan ketentuan tertentu. Meskipun demikian, pembagian kursi akan mengikuti jumlah penduduk di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penentuan daerah pemilihan dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang geografis, politik, ideologi partai, dan konstituen.

Namun, perlu diingat bahwa *split ticket voting* juga dapat memiliki dampak negatif terhadap politik lokal, terutama jika caleg-celag yang dipilih hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan partai mereka. Kehadiran mereka di DPR/DPRD nantinya dapat mengabaikan aspirasi masyarakat di daerah. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan politik lokal menjadi sangat penting, terutama bagi pemilih pemula di daerah. Mereka perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya menilai kinerja caleg, bukan hanya dari segi penampilan fisik, tetapi juga dari segi kinerja dan kontribusi yang telah mereka berikan. Tetapi proses ini tidaklah bisa kita selesaikan dalam satu malam. Dalam perkembangannya masyarakat cenderung memilih caleg yang belum teruji kemampuannya dalam dunia politik, seperti tokoh-tokoh selebritis yang mungkin belum memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas politik dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa *Split ticket voting*, sebagai hasil dari sistem pemilu proporsional terbuka, menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

Salah satu cara untuk mengatasi *split ticket voting* yang meresahkan adalah dengan mengubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan pemilih untuk memilih partai politik secara keseluruhan,

³¹ Benjamin Reilly, "Electoral and political party reform," dalam Indonesia: Democracy and the promise of good governance (Institute of Southeast Asian Studies, 2007), 41–54.

bukan individual kandidat. Dalam sistem ini, peringkat kandidat dalam daftar partai ditentukan oleh partai itu sendiri, bukan oleh pemilih.

Penggunaan sistem proporsional tertutup akan membawa dampak yang signifikan dalam mengurangi fenomena *split ticket voting*. Dengan memilih partai secara keseluruhan, pemilih cenderung untuk memilih kandidat dari partai yang sama di semua tingkatan pemilihan, mengurangi kemungkinan terjadinya *split ticket voting*. Dengan demikian, perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup akan menghasilkan efek positif dalam menekan terjadinya *split ticket voting*.

Selain mengurangi fenomena *split ticket voting*, perubahan ke sistem proporsional tertutup juga akan menciptakan *coattail effect* yang lebih kuat. *Coattail effect*, yang merupakan fenomena di mana popularitas atau keberhasilan seorang kandidat mempengaruhi popularitas atau keberhasilan kandidat lain dari partai yang sama, akan menjadi lebih signifikan dalam sistem proporsional tertutup. Dengan memilih partai secara keseluruhan, pemilih cenderung untuk memberikan dukungan yang lebih besar pada seluruh *slate* kandidat partai dan meningkatkan peluang bagi kandidat-kandidat tersebut untuk terpilih.

Dalam mengubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, tentu saja perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek legal, politis, dan praktis. Namun, potensi untuk mengatasi *split ticket voting* dan menciptakan *coattail effect* yang lebih kuat membuat perubahan ini menjadi sebuah langkah yang layak untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan integritas dan efektivitas sistem pemilu kita.

Penghapusan *Presidential Threshold* untuk Mewujudkan *Coattail effect Ideal*

Mulanya Penggunaan *presidential threshold* dalam pemilihan serentak bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu, untuk meminimalkan pembelahan suara dalam proses pemilihan umum dengan menetapkan ambang batas dukungan yang diperlukan bagi partai politik untuk dapat mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden.³² Dengan adanya ambang batas ini, hanya partai-partai yang memiliki dukungan yang cukup yang dapat bersaing dalam kontestasi pemilihan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi jumlah kandidat dan memperkuat posisi partai politik yang dominan. Sayangnya, ambang batas tersebut menciptakan filter yang membatasi jumlah partai politik atau kandidat yang dapat bersaing dalam pemilihan presiden dan wapres.³³ Hal ini diharapkan akan mengurangi fragmentasi politik dan mencegah terjadinya fragmentasi suara, sehingga memperkuat posisi partai politik yang lebih besar atau dominan.³⁴ Dengan demikian, tujuan utama dari penggunaan *presidential threshold* adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih.

³² Alex Cahyono dkk., "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia," Jurnal Supremasi, 2023, 1–14.

³³ Maichel Wutoy dkk., "Application of the Presidential threshold Concept in the Presidential and Vice-Presidential Election System and its Impact on the Indonesian Constitutional System," Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM) 1, no. 03 (2022): 46–55.

³⁴ Rahmat Muhajir Nugroho dkk., "The Presidential Candidacy Threshold in Indonesia and Its Implications," International Journal of Social Science Research and Review 5, no. 8 (2022): 457–65.

Namun, efektivitas dari penggunaan *presidential threshold* dalam mencapai tujuan tersebut nyatanya tidak tercapai. Justru, penggunaan ambang batas mengurangi variasi politik dan representasi dalam pemilihan umum, serta membatasi hak partai politik yang lebih kecil atau baru untuk bersaing dalam proses politik.³⁵ Selain itu, ambang batas ini memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dengan meniadakan peluang bagi partai-partai kecil untuk mengajukan kandidat mereka dan yang tidak kalah penting penerapan ambang batas ini tidak juga berdampak pada terjadinya efek ekor jas seperti yang didesain sejak awal. Dalam konteks Indonesia, penggunaan *presidential threshold* juga memiliki dampak yang signifikan terutama terkait dengan dinamika politik dan representasi politik.³⁶ Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas politik dan meminimalkan fragmentasi, namun memunculkan masalah yang justru kontra produktif dengan tujuan awalnya dan membatasi hak demokratis partai-partai politik yang lebih kecil dan mempengaruhi keragaman politik di Indonesia kecil dan mempengaruhi keragaman politik di Indonesia.³⁷

Di Indonesia hari ini, *coattail effect* dari *presidential threshold* tidak terjadi secara sempurna. Meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan partai yang terlibat dalam koalisi, efeknya tidak selalu menghasilkan kemenangan bagi partai tersebut. Selain itu, penggunaan ambang batas ini juga memberikan pembatasan terhadap hak partai politik dalam mengajukan kandidat presiden dan wapres, yang jelas mengurangi variasi dan representasi dalam pemilihan umum. Dalam praktiknya di Indonesia, ukuran dan arah *coattail effect* presiden bergantung pada peran partai dalam koalisi, ukurannya, dan posisinya dalam koalisi.³⁸ Oleh karena itu, penghapusan ambang batas ini sangat perlu dipertimbangkan. Lebih lanjut, justru penghapusan ambang batas presiden dapat memperkuat kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk mengajukan kandidat presiden dan wapres tanpa hambatan. Sehingga Ketika penghapusan *presidential threshold* dilakukan, partai-partai politik akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengusung kandidat presiden-wakil dan menyusun koalisi presiden mereka sesuai tujuan dan kepentingan masing-masing koalisi tanpa terikat oleh persyaratan ambang batas.³⁹ Dengan demikian, akan lebih sedikit pembatasan terhadap partisipasi publik dan potensi terciptanya koalisi yang lebih dinamis antara partai politik.

Presidential threshold menghambat *coattail effect* secara substantif karena ketersediaan pilihan pada capres terbatas pada beberapa partai saja sehingga keputusan pemilih dapat bersifat pragmatis. Nampak dalam pemilu 2024, banyak pemilih PDIP yang

³⁵ Catur Wido Haruni, "Presidential threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law," *KnE Social Sciences*, 2022, 408–21.

³⁶ Imawan Sugiharto dan Erwin Aditya Pratama, "Examining the Legal Impact of Presidential threshold Implementation in the 2024 Presidential Election," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 430–42.

³⁷ Mubarik Rahmayanti dan Irfan Amir, "Juridical Analysis Of Implementing The Presidential threshold In The Presidential Election Of Indonesia," *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 83–107.

³⁸ Djayadi Hanan dan Deni Irvani, "The Coattail effect in multiparty Presidential elections: evidence from Indonesia," *Asian Survey* 62, no. 2 (2022): 240–68.

³⁹ Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama, "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 556–75.

memilih pasangan Prabowo-Gibran. *Coattail effect* dapat dipahami dengan bahwa calon presiden sebagai wajah dari partai sehingga representasi ideologi. Visi dan misi partai pada wajah capres yang diusung penting. Penghapusan *presidential threshold* juga harus memperhatikan juga aspek kesiapan masyarakat untuk teredukasi untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang bervariasi, dikarenakan dengan adanya *presidential threshold* akan menerbitkan beragam pasangan capres dan cawapres yang tidak terbatas.

Penutup

Dua pemilu serentak di Indonesia, pada tahun 2019 dan 2024, menunjukkan perbedaan dampak *coattail effect*. Pada 2019, meskipun pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangkan pemilihan Presiden, tidak semua partai pendukungnya mengalami kenaikan suara yang signifikan. Sebaliknya, pada pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran memenangkan presiden, namun partai pengusungnya tidak mengalami kenaikan suara yang sebanding.

Analisis dari kedua pemilu tersebut menunjukkan bahwa popularitas atau elektabilitas pasangan capres tidak selalu secara langsung mempengaruhi perolehan suara partai-partai politik yang mendukungnya. Pada pemilu 2019, terdapat beberapa partai yang mengalami kenaikan suara yang signifikan, seperti PDIP dan PKB, yang merupakan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Namun, ada juga partai-partai lain yang tidak mengalami kenaikan suara yang signifikan, bahkan ada yang mengalami penurunan suara.

Hal serupa terjadi pada pemilu 2024, di mana pasangan Prabowo-Gibran memenangkan presiden namun partai pengusung utamanya, seperti Gerindra dan Golkar, tidak mengalami peningkatan suara yang sebanding. Fenomena ini menunjukkan bahwa *coattail effect* tidak selalu terjadi secara konsisten dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti struktur partai politik dan dinamika politik lokal.

Berbeda dengan pasangan Anies-Muhaimin yang juga mendapatkan *coattail effect* merata bagi partai pengusungnya, di mana perolehan suaranya berbanding lurus dengan capaian suara dari partai koalisinya. Hal ini memunculkan dua kemungkinan, pertama dikarenakan dengan adanya Anies Baswedan yang berlatar belakang non-partai bisa mempersatukan dukungan terhadap koalisinya yang hal ini dibuktikan dengan adanya *coattail effect* yang merata di partai politik koalisi. Kedua, adanya ikatan akar rumput yang kuat dan di dominasi oleh kesamaan ideologis yang di buktikan dengan dua Provinsi yang dimenangkan oleh Anies-Muhaimin, dimenangkan juga oleh Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019 yang dimana Provinsi Sumatera Barat dan Nangroe Aceh Darussalam dikenal dengan kuatnya ideologi agamis.

Kemudian untuk partai koalisi Ganjar Mahfud tidak terjadi *coattail effect* dengan dibuktikan perolehan suara PDIP, PPP, Perindo menurun dibandingkan perolehan suara pemilu 2019. Adanya penurunan suara ini terjadi karena adanya faktor pengkultusan tokoh di dalam demokrasi. Dalam hal ini Presiden Jokowi yang berasal dari partai PDIP dan Gibran yang pernah menjadi anggota partai PDIP memecah suara yang mengakibatkan *split ticket voting vertical* dikarenakan kebingungan yang dialami pemilih.

Dalam mengidentifikasi desain ideal pemilu dengan *coattail effect*, penting untuk mempertimbangkan konteks politik dan institusional yang ada. Pertama, beralih ke sistem proporsional tertutup untuk menghilangkan *split ticket voting*. Penggunaan sistem proporsional tertutup akan membawa dampak yang signifikan dalam mengurangi fenomena *split ticket voting*. Dengan memilih partai secara keseluruhan, pemilih cenderung untuk memilih kandidat dari partai yang sama di semua tingkatan pemilihan, mengurangi kemungkinan terjadinya *split ticket voting*. Dengan demikian, perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup akan menghasilkan efek positif dalam menekan terjadinya *split ticket voting*. Kedua, menghapus *presidential threshold* agar *coattail effect* tidak hanya dirasakan partai politik yang mencalonkan kadernya juga penghapusan *presidential threshold* bukan sepenuhnya untuk mencegah *coattails effect* tapi adanya penghapusan *presidential threshold* untuk *coattail effect* yang tidak pragmatis.

Oleh karena itu, memasukkan pertimbangan *coattail effect* dalam desain pemilu menjadi urgen untuk menciptakan sistem politik yang lebih koheren dan efektif. Desain pemilu yang mempertimbangkan *coattail effect* tidak hanya berpotensi mengurangi fragmentasi politik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan dan efisiensi dalam pembuatan kebijakan. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi, *coattail effect* dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara representasi yang luas dan pemerintahan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Burden, Barry C, dan Gretchen Helmke. "The comparative study of split-ticket voting." *Electoral Studies* 28, no. 1 (2009): 1–7.
- Cahyono, Alex, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, dan Weppy Susetio. "Analisis Kritis terhadap Penerapan *Presidential threshold* dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi*, 2023, 1–14.
- Coffé, Hilde, dan Åsa von Schoultz. "How candidate characteristics matter: Candidate profiles, political sophistication, and vote choice." *Politics* 41, no. 2 (2021): 137–55.
- Cunha Silva, Patrick, dan Brian F Crisp. "Unintended Institutional Interactions: Presidential Coattail and Gender Parity Quotas." *Political Research Quarterly* 75, no. 3 (2022): 620–31.
- Effendi, Tonny Dian. "Estimating the multilevel *coattail effect* during the 2019 Indonesian election." *Asian Affairs: An American Review* 49, no. 3 (2022): 140–65.
- Hanafi, Ridho Imawan. *Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Hanan, Djayadi, dan Deni Irvani. "The *Coattail effect* in multiparty Presidential elections: evidence from Indonesia." *Asian Survey* 62, no. 2 (2022): 240–68.
- — —. "The *Coattail effect* in multiparty Presidential elections: evidence from Indonesia." *Asian Survey* 62, no. 2 (2022): 240–68.
- Haruni, Catur Wido. "Presidential threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law." *KnE Social Sciences*, 2022, 408–21.
- Istania, Ratri. "Split Ticket Voting: Menumbuhkan Kegairahan Politik Lokal?" *Jurnal Borneo Administrator* 5, no. 1 (2009).

- Lembaga Penelitian Politik Indonesia. *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak* 2019, 2021.
- Morhun, Mykola. "Model of redistribution of political parties supporters." Dalam *Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International scientific and practical conference*, 117–19, 2020.
- Ningsih, Surya. "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:57–66, 2023.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Sudarsono Sudarsono, Istislam Istislam, dan Muchamad Ali Safa'at. "The Presidential Candidacy Threshold in Indonesia and Its Implications." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 8 (2022): 457–65.
- Okthariza, Noory. "Explaining party fragmentation at district-level Indonesia." *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 4 (2022): 1008–24.
- PUTRI, INDAH AULIA. "PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA," 2019.
- Raden, Sahran. "PENYERDEHANAAN SURAT SUARA PEMILU DALAM PRESFEKTIF SISTEM PEMILU DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 22–45.
- Rahmayanti, Mubarik, dan Irfan Amir. "JURIDICAL ANALYSIS OF IMPLEMENTING THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN THE PRESIDENTIAL ELECTION OF INDONESIA." *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 83–107.
- Reilly, Benjamin. "Electoral and political party reform." Dalam *Indonesia: Democracy and the promise of good governance*, 41–54. Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- Romansa, Davit. "COATTAIL EFFECT STRATEGY OF GERINDRA PARTY IN 2019 CONCURRENT ELECTION." *Revista UNISCI*, no. 53 (2020).
- Sugiharto, Imawan, dan Erwin Aditya Pratama. "Examining the Legal Impact of Presidential threshold Implementation in the 2024 Presidential Election." *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 430–42.
- Sukmawan, Denny Indra, dan Syaugi Pratama. "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 556–75.
- Ventura, Tiago. "Do mayors matter? Reverse coattail on congressional elections in Brazil." *Electoral Studies* 69 (2021): 102242.
- Wahyudi, Heri, dan Meita Istianda. "PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (PEMILAHAN UMUM PRESIDEN DAN ANGGOTA LEGISLATIF)." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 229–46.
- — —. "PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN ANGGOTA LEGISLATIF)." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022.
- Wisnujati, Ganis, dan Yuwanto Fitriyah. "Marketing Politik Partai Gerindra Untuk Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Kebumen Tahun 2019." *PAN* 2, no. 4 (t.t.): 4.
- Wutoy, Maichel, Eliyunus Waruwu, Ayler Beniah Ndraha, dan Alwi Al Hadad. "Application of the Presidential threshold Concept in the Presidential and Vice-Presidential Election System and its Impact on the Indonesian Constitutional

System." *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)* 1, no. 03 (2022): 46–55.

Zucco, Cesar, dan Timothy J Power. "Fragmentation without cleavages? Endogenous fractionalization in the Brazilian party system." *Comparative Politics* 53, no. 3 (2021): 477–500.